



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **OLVIE ATTENG, SE, M.Si**
J a b a t a n : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : **OLLY DONDOKAMBEY, SE**
J a b a t a n : Gubernur Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

OLVIE ATTENG, SE, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
1.	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	Minimal 5%
		2. Persentase Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK)	30%
2	Terdatanya Potensi Penerimaan Daerah	Jumlah Potensi Wajib Pajak: 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Air Permukaan 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Jumlah Wajib Retribusi 5. Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	652.000 KBM 16 WP 6 WAPU 27 WR 14 Objek
3	Efektifnya Pemungutan Seluruh Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Potensi Wajib Pajak yang Terpungut 2. Persentase Potensi Wajib Retribusi yang terpungut 3. Persentase Potensi Objek Penerimaan di Luar Pajak Daerah dan Retribusi dan Retribusi Daerah yang Terpungut / yang diterima	60% 100% 100%
4	Meningkatnya Kualitas Aparatur	1. Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Fungsional 2. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan substantif	1,5% 2%
5	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik yang Menopang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Perhari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:66 (perhari)
		2. Persentase Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap Kebutuhan	90%

		3. Persentase Ketersediaan Standar Pelayanan Terhadap Kebutuhan	90%
7	Meningkatnya Modernisasi Informasi Layanan Pendapatan Daerah	1. Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem	2%
		2. Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	2%
8	Meningkatnya Sinergitas Antar Institusi Pengelola Pendapatan Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab/ Kota/ Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan.	90%
9	Meningkatnya Ketepatan dan Keakuratan Penyusunan Pelaporan Kinerja	1. Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan	89%
		2. Persentase Penyampaian Laporan Kinerja Secara Tepat Waktu Dengan Tepat Data:	100%
		3. Jumlah Temuan SPI	8 Temuan
		4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Pengawasan	100%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal dalam rangka Pencapaian Target Pendapatan Daerah	Rp. 10.861.740.300
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersedianya Kajian Potensi dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.271.294.000
3.	Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi terhadap Pengelolaan Pajak Daerah baik Pusat maupun UPTD	Rp. 416.041.500
4.	Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil	Pengawasan Terwujudnya Tertib administrasi Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Aset dan Personil	Rp. 1.106.772.000
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Rp. 141.682.400

6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tertib Administrasi, Pelayanan Publik dan Aparatur	Rp. 7.758.625.071
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang Kinerja Aparatur	Rp. 6.190.257.219
8.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Rp. 199.555.000
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDA	Rp. 250.678.000
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 990.207.100
11.	Program Perencanaan SKPD	Terwujudnya Penyusunan Rencana Strategi SKPD	Rp. 111.260.800

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 73.383.066.909

APBD (PAD) : Rp. 73.383.066.909

- Belanja Langsung : Rp. 30.298.108.390

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 43.088.958.519

Manado, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

OLVIE ATTENG, SE, M.Si